PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA III
Tut Wuri Handayani: Development of Education, Science and Technology, and Humanity for the Progress of the Indonesian People
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia

Penguatan Kesadaran Lingkungan Melalui Gerakan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Strengthening Environmental Awareness Through Environmental Movement to Achieving Sustainability Development

Wahyu Kartiko Utami
wahyu.kartiko@untirta.ac.id
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article
Submitted: 28 May 2026 | **Revised**: 13 May 2026 | **Accepted**: 14 May 2026
How to cite: Wahyu Kartiko Utami, "Penguatan Kesadaran Lingkungan Melalui Gerakan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, 2026, P. 194-210.

ABSTRACT

Amid the escalating ecological crisis in various regions of Indonesia, strengthening environmental awareness through the green movement has become a key element in promoting sustainable environmental development. This study aims to analyze how the green movement contributes to increasing environmental awareness and its implications for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The method used is a qualitative approach involving a literature review of various scientific sources, including John Barry's (1996) thoughts on green political theory and sustainable citizenship. The findings indicate that the green movement acts as a catalyst in shaping environmental awareness through increased environmental literacy, mobilization of public participation, and policy advocacy. This movement drives a transformation from individual awareness toward collective action capable of exerting political pressure on the government to formulate and implement green policies. Furthermore, the integration of the green movement and green political awareness contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in efforts to address climate change and environmental pollution. Thus, the green movement is not only a social instrument but also a political mechanism that strengthens public awareness and participation in realizing sustainable development.

Keyword: climate change, environmental awareness, green movement, sustainability development goals.

ABSTRAK

Di tengah meningkatnya krisis ekologis di berbagai daerah di Indonesia, penguatan *kesadaran lingkungan melalui gerakan lingkungan* menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan lingkungan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran lingkungan serta implikasinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, termasuk pemikiran John Barry (1996) mengenai *green political theory* dan *sustainable citizenship*. Hasil kajian menunjukkan bahwa *gerakan lingkungan* berperan sebagai katalis dalam membentuk *kesadaran lingkungan* melalui peningkatan literasi lingkungan, mobilisasi partisipasi publik, serta advokasi kebijakan. Gerakan ini mendorong transformasi dari kesadaran individual menuju aksi kolektif yang mampu menciptakan tekanan politik terhadap pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hijau. Selain itu, integrasi antara *gerakan lingkungan* dan kesadaran lingkungan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) khususnya dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, *gerakan lingkungan* tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga mekanisme politik yang memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

Kata kunci: *perubahan lingkungan,* kesadaran lingkungan, gerakan lingkungan, *pembangunan berkelanjutan.*

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan menjadi tantangan serius yang mengancam kelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Perubahan iklim, deforestasi, polusi udara dan air, serta menipisnya sumber daya alam hanyalah beberapa contoh dari permasalahan lingkungan yang membutuhkan perhatian segera (Satorov, 2020). Krisis lingkungan ini sudah menjadi permasalahan global, termasuk Indonesia yang telah mengalami berbagai krisis ekologi dari tahun ke tahun. Di Indonesia, sekitar 27.7 juta hektar tutupan hutan telah hilang dari tahun 2001 hingga 2019 yang sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan guna budidaya komoditas perkebunan monokultur dan pertambangan (Green Peace Indonesia & INDEF, 2021).

Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran sumber daya alam tidak lagi dapat dilihat sebagai gejala alamiah, melainkan sebagai akibat dari sistem politik-ekonomi yang menempatkan eksploitasi alam sebagai bagian dari strategi pembangunan. Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena kerusakan lingkungan sering kali dilegitimasi melalui kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki ekonomi. Praktik pengesahan undang-undang yang pro-industri ekstraktif seperti UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah dampak tak disengaja, melainkan bagian dari keputusan politik yang sistemik (Agassi, Hendrawan, & Mubarak, 2023).

Kesadaran lingkungan berangkat dari semakin kompleksnya krisis lingkungan global yang tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan politik. Hal ini karena dalam konteks politik hijau, lingkungan menjadi sumber daya yang menyediakan bahan untuk kebutuhan (unairnews, 2018). Oleh sebab itu, permasalahan seperti perubahan Iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta krisis keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan kebijakan publik, pola pembangunan, dan relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Kesadaran lingkungan menjadi penting karena banyak kebijakan pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya kesadaran lingkungan menyebabkan minimnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan yang berkelanjutan, sehingga eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung tanpa kontrol yang memadai. Menurut hasil Youth Sustainability Index (2025) menunjukan bahwa generasi muda Indonesia sebenarnya memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang cukup tinggi, terutama dalam hal perilaku sederhana,

seperti mematikan lampu untuk efisiensi energi atau membawa *tumbler*, namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh praktik nyata yang konsisten. Hal ini menunjukkan dua hal. *Pertama*, mereka kurang memiliki literasi lingkungan untuk mengenali tanda-tanda krisis di sekitarnya. *Kedua*, ada *helplessness* yaitu rasa tidak berdaya yang membuat mereka memilih untuk tidak peduli (kompas.com, 2025).

Banyak penelitian yang membahas mengenai kesadaran lingkungan, namun belum ada penelitian yang membahas spesifik mengenai peran gerakan lingkungan dalam memperkuat kesadaran lingkungan. Peneliti menemukan bahwa banyak kajian mengenai kesadaran lingkungan dan gerakan lingkungan di bahas dalam sekat penelitian yang berbeda. Sedangkan penelitian kesadaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan peneliti temukan di beberapa penelitian, namun penelitian yang menggabungkan ketiga konsep tersebut dalam satu kajian belum peneliti temukan hingga saat ini.

Dalam penelitian Miterianifa dan Mawarni (2024), menjelaskan bahwa kesadaran lingkungan merujuk pemahaman dan pengakuan individu terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Hal ini melibatkan kesadaran manusia terhadap dampak negatif yang di timbulkan oleh aktivitas manusia seperti polusi, kerusakan ekosistem, perubahan iklim hingga penurunan keanekaragaman hayati. Lebih jauh, kesadaran lingkungan juga melibatkan pengakuan terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, serta kesadaran akan tanggung jawab kita untuk bertindak secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi masa depan. Maka, dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, diharapkan bahwa individu dan masyarakat secara kolektif akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem bumi (Noviyanti et al., 2017).

Sedangkan menurut Schultz (2011) mengungkapkan bahwa kesadaran lingkungan berperan penting dalam membentuk perilaku konservasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kesadaran yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, kesadaran lingkungan merupakan faktor kunci dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Sanggarwati, dkk, 2024).

Membangun kesadaran lingkungan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dimana keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat menjadi senjata utama. Dalam penelitian Silfiana & Samsuri (2019) yang berjudul 'Keterlibatan Warga Negara Muda dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan' juga menegaskan bahwa kesadaran lingkungan menjadi hal utama dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi hal yang krusial untuk di lakukan sebab masyarakat merupakan subjek kehidupan, dimana akibat segala permasalahan berakar pada masyarakat. Hal ini juga di perkuat oleh penelitian Arifin, dkk (2026) yang menulis mengenai 'Penguatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Melalui Implementasi Program Penghijauan Desa' yang menegaskan bahwa peran serta masyarakat sebagai subek utama sangat di perlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian Jamil dan Alfazri (2025) menekankan peran komunikasi partisipatif sebagai strategi kunci dalam penguatan kesadaran lingkungan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa komunikasi partisipatif mampu meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait isu lingkungan. Di sisi lain, penelitian Nugroho (2022) menekankan aspek pendidikan sebagai salah satu aspek penting yang memiliki peranan pokok dalam membentuk karakter generasi muda termasuk karakter peduli lingkungan.

Kualitas kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang baik, maka akan baik pula lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya, kualitas kehidupan yang buruk tentu implikasinya pada lingkungan berakibat buruk juga (Setyowati, 2018). Oleh sebab itu, membangun kesadaran lingkungan pada masyarakat menjadi semakin penting karena kesadaran ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan, tetapi juga memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah dan sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran tersebut, berbagai permasalahan lingkungan berpotensi semakin memburuk dan mengancam keberlanjutan kehidupan di masa depan.

Gerakan lingkungan khususnya oleh komunitas memiliki peran strategis dalam memperkuat *kesadaran politik hijau* karena ia menjembatani kesenjangan antara persoalan ekologis yang nyata dengan proses politik yang menentukan arah pembangunan. Tanpa gerakan ini, isu lingkungan cenderung berhenti pada wacana teknokratis; dengan adanya gerakan, isu tersebut naik menjadi agenda politik yang diperdebatkan, diawasi, dan diputuskan secara publik. Dalam hal ini, keterlibatan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan perilaku berkelanjutan. Sebagai contoh Program Youth Activist WWF, telah berhasil menumbuhkan kebiasaan positif, seperti membawa botol minum sendiri, memilah sampah, atau menginisiasi kampus bebas plastic (Kompas.com, 2025).

Pada akhirnya, peningkatan kesadaran lingkungan melalui gerakan lingkungan baik yang di inisasi oleh komunitas atau organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terlebih isu lingkungan telah menjadi pilar penting dalam wacana pembangunan sejak awal 1970-an. Bahkan semenjak akhir 1980- an soal ini telah menjadi arus

utama berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat global maupun nasional (World Commision for Environment and Development, 1987). Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Lembaga Pembangunan global terutama donor dan organisasi masyarakat sipil khususnya trans nasional telah memungkinkan mereka menjadi agen produksi dan reproduksi wacana lingkungan dan Pembangunan (Kurniawan, 2012). Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran dan kontribusi organisasi atau komunitas lingkungan dalam menguatkan kesadaran politik hijau masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam penelitian ini, komunitas yang akan di kaji berfokus pada tiga komunitas besar yang aktif dalam menyuarakan gerakan lingkungan baik di ranah lokal atau nasional di antaranya yaitu Greenpeace, World Wide Fund for Nature (WWF) dan Walhi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **deskriptif.** Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, dinamika, dan peran gerakan lingkungan dalam membangun kesadaran politik hijau, bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, perspektif, serta interpretasi dari berbagai sumber ilmiah secara komprehensif (Creswell, 2022). Sedangkan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada penelitian kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian kualitatif deskriptif di awali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat di tarik suatu kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Sugiyono, 2013). Tujuan dari penggunaan metode deksriptif ini adalah membuat deskripsi yang bersifat aktual mengenai fenomena sesungguhnya yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **data sekunder** yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional, website, dan portal berita dengan kunci yang berkaitan dengan kesadaran lingkungan, gerakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan teknik analisis data di lakukan secara sistematis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 2002).

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran lingkungan dalam gerakan lingkungan di Indonesia dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan partisipatif, yang saling berkaitan dan membentuk proses transformasi dari pengetahuan menuju tindakan kolektif. Dalam perspektif teoretis, hal ini sejalan dengan konsep ***ecological citizenship*** (kewargaan ekologi) yang dikembangkan oleh Dobson (2003) yang menekankan bahwa perilaku pro-lingkungan tidak hanya

bergantung pada tindakan, tetapi juga pada pembentukan nilai, sikap, dan tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Hal ini juga di tegaskan dalam penelitian Gusmadi (2018) yang menjelaskan bahwa kewarganegaraan lingkungan tidak akan muncul secara spontan, melainkan harus di ciptakan secara kolektif. Menurut Gusmadi (2018), kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan dan keterlibatan warga negara dalam komunitas sipil menjadi pemecahan masalah lingkungan yang di lakukan melalui pelatihan oleh aktivis lingkungan.

Dobson (2003) menjelaskan bahwa perubahan menuju keberlanjutan mensyaratkan transformasi pada dua aspek utama, yaitu *dispositions* (nilai dan kesadaran) dan *performances* (tindakan nyata), yang secara implisit mencerminkan hubungan antara dimensi kognitif, afektif, dan partisipatif. Pada dimensi kognitif, masyarakat terlebih dahulu memperoleh pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Pengetahuan ini menjadi dasar penting karena tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung melihat persoalan lingkungan sebagai fenomena alam semata, bukan sebagai hasil dari kebijakan dan aktivitas manusia.

Edukasi lingkungan yang dilakukan oleh berbagai organisasi di Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam **memperkuat dimensi kognitif kesadaran politik hijau,** yaitu pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan cara berpikir masyarakat terhadap isu lingkungan sebagai isu publik dan politik. Pada tahap ini, penguatan tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga sejauh mana informasi tersebut mampu membentuk cara pandang kritis terhadap relasi antara lingkungan, kebijakan, dan kekuasaan.

WALHI merupakan sebuah komunitas yang aktif bergerak di isu lingkungan. Sebagai komunitas yang aktif sebagai penggerak lingkungan, WALHI berfokus pada pendidikan lingkungan, kampanye lingkungan, advokasi kebijakan lingkungan, penelitian lingkungan, hingga pengembangan masyarakat (Utami, 2025). Pada tataran nasional, Walhi memainkan peran penting dalam membangun basis pengetahuan yang bersifat **kritis dan struktural.** Melalui laporan advokasi, kajian lingkungan, dan diskusi publik, WALHI tidak hanya menyampaikan fakta kerusakan lingkungan, tetapi juga menjelaskan akar permasalahan seperti kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan akses (globalsociety.earth). Edukasi semacam ini memperluas dimensi kognitif masyarakat dari sekadar "tahu" menjadi "paham", sehingga masyarakat mulai mengaitkan persoalan lingkungan dengan keputusan politik dan kepentingan ekonomi.

Gambar 1. Edukasi Lingkungan oleh WALHI



Sumber: Instagram WALHI Nasional

Sementara itu, organisasi lingkungan dalam tataran international seperti Greenpeace berkontribusi dalam memperkuat dimensi kognitif melalui pendekatan **komunikasi publik yang sederhana namun masif.** Berdasarkan eksistensi Greenpeace di Indonesia sejak tahun 2006 dan merujuk pada rilis website Greenpeace, maka setidaknya mereka telah memperoleh 14 kemenangan dalam perjuangan lingkungan hidup yang berhasil di peroleh di Indonesia (Greenpeace, 2024). Salah satu dari sekian banyak capaian Greenpeace yaitu menumbuhkan kesadaran tentang dampak berbahaya dari energi Listrik yang berasal dari nuklir, dengan berhasil mendorong para ulama di Pulau Jawa dan Madura untuk mengeluarkan fatwa "haram" terkait Pembangunan PLTN di Indonesia tahun 2007 (Fakhrian, dkk, 2024).

,

Gambar 2. Edukasi Lingkungan oleh Greenpeace di SMK 1 Kelapa Kampit



Sumber: Kompasiana.com

Greenpeace aktif melakukan edukasi lingkungan kepada anak-anak muda, termasuk ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selain itu, Greenpeace juga aktif melakukan edukasi lingkungan melalui media sosial seperti kampanye visual, infografis, dan konten digital. Hal ini membantu dalam menyederhanakan isu kompleks seperti perubahan iklim dan deforestasi menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, penguatan kognitif terjadi melalui peningkatan literasi lingkungan secara cepat dan luas, terutama di kalangan generasi muda. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pemahaman yang terbentuk tidak bersifat dangkal, melainkan berkembang menjadi kesadaran kritis. Selain itu, World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia memperkuat dimensi kognitif melalui pendekatan **edukasi berbasis praktik dan pengalaman langsung.** Program pendidikan lingkungan, pelibatan masyarakat dalam konservasi, serta kurikulum berbasis lingkungan membantu masyarakat memahami konsep ekologis secara kontekstual (wwf.id). Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman ini cenderung lebih melekat dan aplikatif, sehingga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Gambar 3. Edukasi Lingkungan oleh WWF



Sumber: Facebook WWF Indonesia

Secara keseluruhan, edukasi lingkungan oleh organisasi-organisasi tersebut memperkuat dimensi kognitif kesadaran politik hijau melalui tiga proses utama yaitu peningkatan literasi lingkungan, pembentukan pemahaman kritis, dan pengaitan isu lingkungan dengan struktur politik. Penguatan ini menjadi fondasi penting, karena tanpa basis kognitif yang kuat, dimensi afektif dan partisipatif tidak akan berkembang secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan membangun kesadaran lingkungan di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dan kedalaman edukasi kognitif yang dilakukan oleh berbagai aktor lingkungan.

Selanjutnya, dimensi afektif menunjukkan perkembangan kesadaran pada tingkat emosional, di mana individu mulai memiliki kepedulian dan sikap terhadap lingkungan. Kepedulian ini dapat muncul dari pengalaman langsung maupun paparan informasi yang intensif. Kesadaran afektif ini berkesinambungan dengan kesadaran kognitif dan kesadaran partisipatif. Dimensi afektif menjadi jembatan antara pengetahuan (kognitif) dan tindakan (partisipatif), karena tanpa keterlibatan emosional, informasi yang dimiliki masyarakat seringkali tidak berkembang menjadi dorongan untuk bertindak. Jika ditarik dalam kerangka kognitif, afektif hingga partisipatif, kontribusi yang di lakukan organisasi lingkungan di Indonesia menunjukan pola yang saling melengkapi dan pada akhirnya dapat memberikan hasil pada penguatan kesadaran lingkungan secara bertahap.

Edukasi lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia menunjukan kontribusi kuat dalam membangun dimensi afektif kesadaran politik hijau melalui kampanye yang menekankan aspek emosional dan visual. Greenpeace aktif melakukan kampanye seperti perlindungan hutan, laut, dan iklim, termasuk kampanye **#SaveRajaAmpat** yang menyoroti ancaman tambang terhadap ekosistem laut (greenpeace.org). Strategi ini tidak hanya meningkatkan

pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa cemas, peduli, dan urgensi di kalangan masyarakat. Emosi tersebut menjadi pemicu terbentuknya sikap kritis terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam, sehingga memperkuat kesadaran politik hijau pada tingkat afektif sebagai dasar untuk keterlibatan lebih lanjut. Dalam konteks kesadaran politik hijau, emosi-emosi tersebut menjadi pemicu awal munculnya sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap merusak lingkungan.

Gambar 4. Gerakan #SaveRajaAmpat oleh Greenpeace Indonesia



Sumber: Website Greenpeace Indonesia

Di sisi lain, WWF Indonesia memperkuat dimensi afektif melalui pendekatan yang lebih **emosional-empatik dan berbasis pengalaman langsung**. Program konservasi satwa, edukasi lingkungan di sekolah, dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian alam membangun kedekatan emosional antara manusia dan lingkungan. Program WWF seperti *Nature X Youth* bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga lingkungn, sementara kampanye *Beyond Wildlife* menekankan bahwa pelestarian alam berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup manusia (wwf.id). Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari lingkungan yang lestari atau terlibat dalam perlindungan ekosistem, muncul rasa memiliki (sense of belonging) dan tanggung jawab moral yang lebih kuat.

Gambar 5. Gerakan Digital Activist Nature X Youth oleh WWF



Sumber: Instagram WWF Indonesia

Di sisi lain, Walhi memperkuat dimensi afektif melalui pendekatan keadilan ekologis yang menyoroti dampak kerusakan lingkungan terhadap kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Edukasi yang disampaikan tidak hanya menumbuhkan kepedulian terhadap alam, tetapi juga membangkitkan empati sosial dan solidaritas terhadap korban ketidakadilan lingkungan. Narasi konflik ekologis yang diangkat WALHI sering kali memunculkan emosi moral seperti kemarahan dan keberpihakan, yang menjadi dasar penting dalam membentuk sikap politik masyarakat. Dengan demikian, dimensi afektif yang dibangun tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga politis, karena mendorong masyarakat untuk melihat isu lingkungan sebagai bagian dari perjuangan keadilan sosial.

Terakhir yaitu dimensi partisipatif menjadi indikator paling konkret dari kesadaran lingkungan, karena pada tahap ini masyarakat tidak hanya peduli, tetapi juga terlibat dalam aksi nyata baik secara individu maupun kolektif. Keterlibatan ini dapat berupa partisipasi dalam gerakan sosial, advokasi kebijakan, maupun kegiatan konservasi lingkungan.

Edukasi lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia secara nyata memperkuat dimensi partisipatif kesadaran politik hijau melalui mekanisme mobilisasi aksi publik. Greenpeace tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menyediakan ruang partisipasi seperti petisi, kampanye digital, dan aksi kolektif yang mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam isu lingkungan. Melalui berbagai kampanye seperti perlindungan hutan, energi terbarukan, hingga #SaveRajaAmpat, masyarakat diajak untuk "ikut beraksi" dan memberikan tekanan kepada pemerintah maupun korporasi (greenpeace.org). Dalam kajian akademik, gerakan Greenpeace di Indonesia bahkan dikategorikan sebagai bagian

dari gerakan sosial-politik hijau yang mampu memengaruhi kebijakan melalui strategi kampanye dan tekanan public. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan telah berhasil mentransformasikan masyarakat dari sekadar mengetahui menjadi aktor yang berpartisipasi dalam advokasi politik lingkungan.

Sementara itu, WWF Indonesia memperkuat dimensi partisipatif melalui pendekatan aksi kolektif berbasis komunitas, salah satunya melalui kampanye *Earth Hour* (wwf.id). Program ini tidak hanya bersifat simbolik (mematikan lampu), tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan masyarakat di berbagai kota untuk melakukan aksi nyata dan perubahan gaya hidup ramah lingkungan . Dalam perspektif akademik, *Earth Hour* dipandang sebagai gerakan global yang mampu menghubungkan masyarakat dengan kekuatan politik dan ekonomi melalui partisipasi publik dalam isu perubahan iklim . Dengan demikian, edukasi WWF tidak hanya membangun kepedulian, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam gerakan lingkungan yang memiliki implikasi politik.

Di sisi lain, Walhi menunjukkan bentuk partisipasi yang lebih kritis melalui advokasi dan mobilisasi masyarakat dalam konflik lingkungan. WALHI aktif mendampingi masyarakat dalam aksi protes, kampanye kebijakan, dan perjuangan hak atas lingkungan hidup. Aktivisme komunitas tidak hanya terbatas pada ruang public konvensional seperti di lapangan atau jalanan, namun saat ini sudah merambah pada dunia digital. WALHI memiliki berbagai media sosial sebagai sarana untuk mengadvokasikan isu iklim dan lingkungan, mulai dari Instagram, Tiktok, Linkedin, hingga website (Utami, 2025). Dalam konteks ini, edukasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik, seperti demonstrasi dan advokasi kebijakan. Bentuk partisipasi ini mencerminkan tingkat kesadaran politik hijau yang lebih tinggi karena masyarakat berperan sebagai subjek yang aktif dalam memperjuangkan keadilan ekologis.

Gambar 6. Jalan Santai dan Gerakan Penanaman Pohon oleh WALHI



Sumber: Instagram WALHI

Edukasi lingkungan yang dilakukan oleh berbagai organisasi tersebut menunjukkan bahwa dimensi partisipatif kesadaran lingkungan di Indonesia terbentuk melalui tiga mekanisme utama yaitu mobilisasi aksi publik, keterlibatan komunitas, dan advokasi kebijakan. Ketika masyarakat diberi ruang untuk bertindak baik melalui petisi, aksi kolektif, maupun gerakan sosial maka kesadaran lingkungan berkembang dari sekadar sikap menjadi praktik nyata yang mampu memengaruhi kebijakan dan arah pembangunan.

Lebih lanjut, penguatan kesadaran lingkungan melalui edukasi lingkungan yang dilakukan oleh berbagai organisasi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya mewujudkan tujuan **pembangunan berkelanjutan (SDGs).** Organisasi seperti Walhi, Greenpeace Indonesia, dan WWF Indonesia tidak hanya membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat fondasi sosial dan politik yang dibutuhkan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam dimensi kognitif, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai keterkaitan antara aktivitas pembangunan dan dampak ekologis membantu membentuk pemahaman bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dimensi afektif, munculnya kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan dan praktik pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, pada dimensi partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam gerakan lingkungan, advokasi

kebijakan, dan aksi kolektif menjadi bentuk nyata kontribusi publik dalam mengawal arah pembangunan agar tetap berada dalam jalur keberlanjutan.

Penguatan kesadaran lingkungan oleh organisasi lingkungan di Indonesia banyak dilakukan karena adanya kekecewaan terhadap pemerintah. Seperti pembentukan Partai Hijau Indonesia (PHI) oleh WALHI yang di latarbelakangi kekecewaan terhadap partai-partai yang ada tidak pernah serius dan konsisten mendorong agenda *green politics* (Ahmady, dkk, 2022). Meskipun beberapa partai politik telah memiliki visi menjaga lingkungan, tetapi mereka tidak menjadikan angenda tersebut sebagai prioritas. Oleh sebab itu, para aktivis WALHI menganggap perlunya mendorong partai politik alternatif yang memperjukan isu lingkungan dengan sungguh-sungguh (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Dalam hal ini, isu lingkungan hanya menjadi pembicaraan pada masa kampanye namun tidak bisa naik hingga ke level kebijakan publik yang pro terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat masih adanya kerusakan lingkungan akibat kebijakan politik lingkungan yang tidak berkelanjutan (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016).

Sedangkan dari Greenpeace menekankan adanya oligarki yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan politik hijau di Indonesia. Menurut kampanye Greenpeace, oligarki politik dan bisnis memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan lingkungan sehingga advokasi organisasi lingkungan seringkali tidak efektif dalam mendorong perubahan kebijakan. Hal ini dapat di lihat contohnya dalam konflik tambang, ekspansi sawit, deforestasi hingga proyek strategis nasional yang di nilai mengabaikan aspek ekologis. Hal ini juga di pertegas oleh Nurhidayah (2022) yang menjelaskan bahwa meski memberikan dukungan penuh terhadap Kebijakan Satu Peta (KSP), Greenpeace Indonesia belum bisa berhasil mendoring pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas guna melegalisasi karena adanya pengaruh oligarki yang kuat.

Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat di lihat bahwa ketiga dimensi kesadaran lingkungan membentuk suatu alur yang progresif, dari mengetahui (kognitif), merasakan (afektif), hingga bertindak (partisipatif). Selain itu, kesadaran lingkungan yang terbentuk melalui proses edukasi ini juga berfungsi sebagai **modal sosial dan politik** dalam mendorong akuntabilitas pemerintah serta menekan praktik pembangunan yang eksploitatif. Masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Dengan demikian, gerakan lingkungan berperan sebagai katalisator yang menghubungkan antara kesadaran individu dengan perubahan struktural dalam sistem pembangunan.

Namun dalam konteks Indonesia, tantangan utama terletak pada mendorong transisi dari dimensi afektif ke partisipatif, agar kepedulian masyarakat tidak berhenti pada level sikap, tetapi berkembang menjadi kekuatan sosial-politik yang mampu memengaruhi kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan komitmen politik yang konsisten, kesadaran masyarakat berpotensi tidak terkonversi menjadi perubahan sistemik. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengintegrasikan kesadaran lingkungan ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi lingkungan dan gerakan organisasi hijau tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, di mana keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.

Saran

Dalam hal ini, saran yang bisa penulis sampaikan yang pertama yaitu pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendukung dan menginstitusionalisasikan edukasi lingkungan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum formal, penguatan regulasi terkait partisipasi publik, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, kesadaran lingkungan tidak hanya berkembang secara sporadis, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional. Selain itu, diperlukan juga penguatan kapasitas masyarakat, khususnya di tingkat lokal, agar masyarakat mampu berpartisipasi secara efektif dalam isu-isu lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas perlu ditingkatkan, baik melalui pelatihan advokasi, literasi kebijakan, maupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan.

Daftar Pustaka

Agsari, Karenina Shashal., dkk. (2018). Development of Eco Culture to Improve Enviromental Literacy in Elementary School. 3rd National Seminar on Educational Innovation: Conference Series, 1(2): 217-222.

Ahmady, Dkk. (2022). Gerakan Lingkungan Dan Partai Politik: Studi Tentang Perjuangan Walhi Dalam Pembentukan Partai Hijau Indonesia. Journal Of Politics And Democracy Studies Vol.3 No.1 Tahun 2022

Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. S. (2016). NGO's Roles and Strategies in the Environmental Politic Arena. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 210 216.

Arifin, dkk. (2026). Penguatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Melalui Implementasi Program Penghijauan Desa. Bale Ngabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5, Nomor 1 (2026) Januari-Maret

Asilsoy, buket and Deray Oktay. (2018). Exploring environmental behaviour as the major determinant of ecological citizenship. Sustainable cities and society vol. 39 May 2018, Pages 765-771

Bantulkab.go.id. (2009). Kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Di ambil dari https://bantulkab.go.id/berita/detail/480/kesadaran-masyarakat-terhadap-lingkungan-masih-rendah.html

Barry, John. (1996). Green Political Theory: Nature, Virtue and Progress. Department of Politics University of Glasgow

Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Oligarchy Domination and The Absence of Green Political Party in Indonesia. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 19 No 2 Pages 151- 167.

Creswell, David and John W. Creswell. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

Dobson, A. (2003). Citizenship and the Environment. Oxford: Oxford University Press.

Dobson, A. (2007). *Green political thought*. Routledge.

Fakhrian, ddk. (2024). Greenpeace: Sebuah Gerakan Sosial Dan Politik Hijau Di Indonesia (Kampanye Greenpeace Di Jakarta 2006-2021. Journal on Education Volume 06, No. 04, Mei-Agustus 2024, pp. 18632-18656

Gusmadi, Setiawan. (2018).Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.

Jamil, Bahrul & Alfazri, M. (2025). Komunikasi Partisipatif Sebagai Strategi Penguatan Kesadaran Lingkungan Dan Kebijakan Hijau. Jurnal Syiar Syiar Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli 2025 - Desember 2025

Kompas.com. (2025). Anak Muda Cinta Lingkungan tapi Belum Bertindak, Ini Temuan Youth Sustainability Index 2025. Di ambil dari: https://lestari.kompas.com/read/2025/10/09/193100386/anak-muda-cinta-lingkungan-tapi-belum-bertindak-ini-temuan-youth?page=1.

Kurniawan, Nanang Indra. (2012). Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 1, Juli 2012 (1-15)

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2002). *Analisis Data Kualitatif.* (Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tjetjep Rohendi). Jakarta: Ul-Press.

Miterianifa &Mawarni, Muhammad Fiqri. (2024).Penerapan Model Pembelajaran

Literasi Lingkungan dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains Vol.7, No.1, Februari 2024: 68-73*

Mironshoh Sattorov. (2020). "Towards a Sustainable Future: Addressing Climate Change, Reforestation, and the Aral Sea Crisis with Econometric Models," Scientific Research Archive5, no. 5 (2020): 1–6, https://doi.org/10.55439/sra/03685

Noviyanti, L. A., Rachmawati, D. A., & Sutejo, I. R. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*, *3*(3), 69–70.

Nugroho, Moh Alfan. (2022). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan. Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Vol. 1, No. 2 (2022): 93-108

Nurhidayah, Gita. (2022). *The Challenges of Greenpeace Indonesia's Support on One Map Policy Indonesia*. Journal of International Studies on Energy Affairs.

Sanggarwati, Diah Ayu, Fitri Komariyah dan Ari Susanto. (2025). Penguatan Kesadaran Lingkungan, Manajemen Sampah, Partisipasi Komunitas, dan Teknologi Hijau dalam Program Desa Bersih dan Berkelanjutan Di Desa Putatjaya Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol.2 No 3 Tahun 2025

Setyowati. (2018). Problematika Lingkungan Hidup dalam Syair Lagu Populer Indonesia (Studi Ekologi Sastra). Jurnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia, 1(1): 45-63.

Silfiana, L., & Samsuri, S. (2019). Keterlibatan Warga Negara Muda dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Studi Pemuda*, *8*(2), 127. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48180

Schultz, P. W. (2011). Conservation means behavior. Conservation Biology, 25(6), 1080–1083.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Unairnews. (2018). Green politic dalam upaya Pembangunan berkelanjutan (editor: Bambang bes). Diambil dari https://unair.ac.id/green-politics-dalam-upaya-pembangunan-berkelanjutan/ (diakses pada 26 April 2026)

Utami, Wahyu Kartiko. (2025). Analisis Gerakan Politik Hijau WALHI Melalui Media Sosial Instagram dalam Mewujudkan Kesadaran Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Volume. 2, No. 1, Tahun 2025

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future. Oxford University Press*. Oxford